

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA KECAMATAN
SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi**

Oleh

**DIFA PUTRI DIAFAN
NPM: 1802110011**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 6 September 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

DIFA PUTRI DIAFAN
NPM : 1802110011

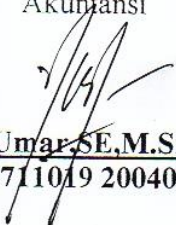
Dengan judul:

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA DESA PADA KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH
SINGKIL**

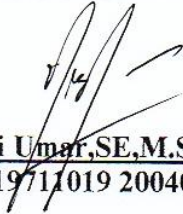
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

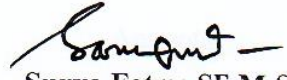
Ketua Program Studi
Akuntansi


Ikifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
IK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing II


Surya Fatma, SE, M.Si
NIK. 19651031 199406 2 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 6 September

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

DIFA PUTRI DIAFAN
NPM : 1802110011

Dengan judul:

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA DESA PADA KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH
SINGKIL**

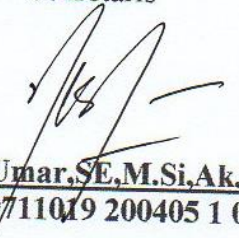
Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 18 Agustus 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

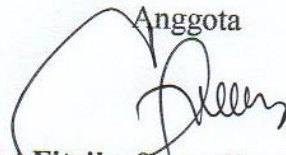
Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

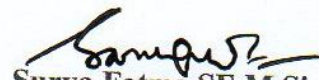
Sekretaris


Zulkifi Umar, SE, M.Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

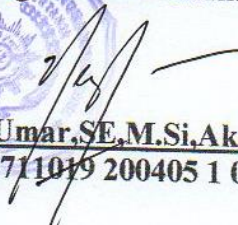
Anggota


Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Anggota


Surva Fatma, SE, M.Si
NIK. 19651031 199406 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 6 September 2022
Yang Menyatakan




Difa Putki Diafan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Difa Putri Diafan
NPM : 1802110011
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 6 September 2022

Yang Menyatakan,




Difa Putri Diafan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil”**. Selanjutnya Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam isi maupun teknik penulisan. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah, Ibu adik dan keluarga besar sanak saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih selalu menjaga saya dalam doa sehingga hidup saya menjadi mudah dan lancar terimakasih juga telah memberikan motivasi serta memberikan semangat kepada saya dan terimakasih juga kepada diri saya sendiri karna selalu kuat dan sabar sehingga masih bisa ada di titik ini dalam keadaan sehat.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE,M.Si,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak zulkifli Umar, SE,M.Si,Ak,CA, selaku Pembimbing I dan Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan ibu Surya Fatma, SE.M.Si selaku Pembimbing II.

4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE,M.Si, selaku ketua Laboraturium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh khususnya staf pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Sahabat, teman-teman, serta seseorang spesial yang tidak dapat disebutkan namanya yang selalu memberikan dorongan, bantuan, perhatian, semangat, selalu mendengarkan keluhan serta menghibur saya.
7. Seluruh informan penulis di Desa Kecamatan Singkil yakni Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan waktunya kepada penulis.

Akhir kata hanya kepada-NYA kita berserah diri semoga selalu berada dalam lindungan dan rahmat-NYA, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Banda Aceh, Juli 2022

Penulis

Difa Putri Diafan
1802110011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
 BAB II TINJAUANKEPUSTAKAAN	 9
2.1 LandasanTeori	9
2.1.1 Pengelolaan Keuangan Dana Desa	9
2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Dana Desa	9
2.1.1.2 Sumber Dana Desa.....	11
2.1.1.3 Tujuan dan Manfaat Dana Desa.....	12
2.1.1.4 Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa .	12
2.1.1.5 Indikator Pengelolaan Dana Desa.....	13
2.1.2 Transparansi.....	14
2.1.2.1 Pengertian Transparansi.....	14
2.1.2.2 Indikator Transparansi	17
2.1.3 Akuntabilitas.....	17
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas.....	17
2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas	18
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Pemikiran	22
2.3.1 Hubungan Transparansi dengan Pengelolaan Keuangan Desa.....	22
2.3.2 Hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Keuangan Desa	23
2.4 Hipotesis	23
 BAB III METODE PENELITIAN	 25
3.1 Operasionalisasi Variabel	25
3.1.1 Tujuan Penelitian	25
3.1.2 Jenis Penelitian	25
3.1.3 Waktu Penelitian.....	26
3.1.4 Unit Analisis	26
.....	

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	26
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	27
3.4 Definsi Operasionalisasi Variabel.....	28
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
3.5.1 Pengujian Kualitas Data.....	31
3.5.1.1 Uji Validitas	31
3.5.1.2 Uji Realibilitas	31
3.5.1.3 Uji Asumsi Dasar	33
3.6 Pengujian Hipotesis	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil	39
4.2. Karakteristik Responden	40
4.3. Hasil Pengujian Data.....	42
4.3.1. Uji Validitas Instrumen	42
4.3.2. Uji Reliabilitas Instrumen.....	43
4.3.3. Uji Asumsi Klasik	44
4.3.3.1 Uji Normalitas	44
4.3.3.2 Uji Multikolinearitas.....	45
4.3.3.3 Uji Heterokedastistas	46
4.4. Analisis Deskriptif	47
4.4.1 Variabel Pengelolaan Keuangan Dana Desa	47
4.4.2 Variabel Transparansi.....	49
4.4.3 Variabel Akuntabilitas	50
4.5. Pembahasan.....	52
4.5.1 Pengujian Hipotesis	52
4.5.2 Pengujian Secara Simultan dan Parsial	55
4.5.2.1 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa	56
4.5.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa TA 2018/2019 Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.....	21
Tabel 2.1 Matrik Penelitian Sebelumnya	21
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	27
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	30
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	40
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas.....	42
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas variabel penelitian (Alpha)	43
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolineritas	45
Tabel 4.5 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengelolaan Keuangan Dana Desa	47
Tabel 4.6 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Transparansi	49
Tabel 4.7 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas	51
Tabel 4.8 Pengaruh variabel bebas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	52
Tabel 4.9 Model Summury	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	23
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas	44
Gambar 4.2. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuisisioner	
Lampiran 2. Data Kuisisioner	
Lampiran 3. Frequencies Identitas Responden	
Lampiran 4. Frequencies Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	
Lampiran 5. Frequencies Transparansi	
Lampiran 6. Frequencies Akuntabilitas	
Lampiran 7. Reliability dan Validitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa	
Lampiran 8. Reliability dan Validitas Transparansi	
Lampiran 9. Reliability dan Validitas Akuntabilitas.....	
Lampiran 10. Regression	

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA KECAMATAN
SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**DIFA PUTRI DIAFAN
NPM: 1802110011**

Pembimbing I : Zulkifli Umar, SE, M.Si

Pembimbing II : Surya Fatma, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil baik secara parsial maupun secara simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui daftar kuisisioner dan studi dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji simultan dan uji parsial. Objek penelitian ini adalah tentang Transparansi dan Akuntabilitas serta Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil). Ukuran sampel penelitian ini sebanyak 48 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi maupun Akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Transparansi maupun Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang sudah ada dan tumbuh seiring dengan adanya sejarah kehidupan masyarakat di Indonesia yang kemudian menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia, dimana dalam hal ini merupakan wujud pengakuan Negara terhadap desa sebagai upaya memperjelas fungsi kewenangan dari desa, selain itu juga lebih menguatkan kedudukan desa dan masyarakat desa yang akan menjadi subjek dari pembangunan (Afrizal, 2019).

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan langkah awal bagi desa untuk menjalankan kewenangannya. Dalam pengelolaan dana desa sebagian kalangan masyarakat banyak yang meragukan kesiapan desa dalam mengelolah dana desa dan ada juga sebagian yang menyakini bahwa desa telah siap dalam mengelola dana tersebut. Kepala desa menjadi faktor kunci utama dari sisi sumber daya manusia yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Agar dana desa dapat dikelola dengan baik harus dibutuhkan pemeriksaan atas kebijakan-kebijakan yang ada, pengawasan yang ketat, dan meningkatkan kapasitas serta kesadaran aparatur desa. Kepala desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan dana desa, sehingga dalam mengawasi pelaksanaan, desa tidak hanya meminta persetujuan badan

permusyawaratan desa dalam menentukan penggunaan keuangan desa oleh kepala desa.

Pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi, artinya dalam menjalankan pemerintah transparansi juga mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan masyarakat luas, sehingga keterbukaan prinsip yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Riska (2020) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*). Transparansi ditandai oleh kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.

Menurut Tahir, (2018:175) prinsip *transparency* atau *openness* berarti tidak saja mengarah adanya mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa daerah telah menerbitkan peraturan daerah (Perda) terkait transparansi dan partisipasi masyarakat sebelum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terbit. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.

Salah satu unsur utama selain transparansi dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintah sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan didalam otonomi daerah untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut akuntabilitas memiliki peran penting untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya dalam kepentingan publik (Budi, 2015).

Pemerintah desa dan kepala desa dapat juga dijadikan cerminan terwujudnya *Good Governance*, karena pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga dapat mendorong akuntabilitas, transparansi, dan reponsivitas pemerintah lokal. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah dapat menegakkan supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi dan dapat diakses oleh pihak yang memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan serta efisien, akuntabilitas dan adanya visi strategis.

Kabupaten Aceh Singkil terletak pada wilayah pesisir Barat-Selatan Provinsi Aceh yang membentang dari Utara berupa kawasan perbukitan kearah Selatan berupa kawasan pesisir pantai. Sekitar 146.274,65 Ha (66,88%) wilayah berada pada ketinggian 0-100 meter dpl. Sedangkan wilayah yang berada pada ketinggian 100-500 meter dpl (diolah dari Peta Bakosurtanal Skala 1:250.000). Berdasarkan peta topografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh

Singkil adalah daratan. Aceh Singkil memiliki 12 Kecamatan dan 116 Gampong, per Tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 102.213 yang terdiri atas 51.638 pria dan 50.575 wanita dengan luas daerah 185.803 ha, tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 39 jiwa/km². Pada Tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 129.963 jiwa dengan luas wilayahnya 2.185,00km² dan sebaran penduduk 60 jiwa/km². Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan dana desa, kebijakan adalah suatu keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti kepada masyarakat Kecamatan Singkil, masih banyak keraguan masyarakat tentang pengelolaan dana desa di Kecamatan Singkil, karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat, selain itu musyawarah desa belum maksimal, sedangkan musyawarah desa merupakan salah satu akses bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan musyawarah desa merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Desa Tahun 2014. Selain itu dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa kendala yaitu lambannya proses pencairan dana, aparat desa yang masih minim pengetahuan tentang proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga masih sangat bergantung kepada tenaga akuntansi dan tenaga pendamping desa.

Kebijakan yang mengatur dana desa terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 60 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui adanya peningkatan berupa pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa,

mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat desa sebagai subjek pembangunan desa. Sebagai contoh pembangunan untuk jalan desa dan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) desa. Berikut dana desa yang diberikan untuk 16 desa di Kecamatan Singkil.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa TA 2018/2019 Kecamatan Singkil
Kabupaten Aceh Singkil

No	Nama Desa	Jumlah Dana Desa		Keterangan
		2018	2019	Naik/Turun
1	Pasar Singkil	Rp.382,693,410	Rp.381,790,703	Turun
2	Kampung Ujung	Rp.390,930,588	Rp.435,679,925	Naik
3	Pulo Sarok	Rp.410,367,163	Rp.440,494,772	Naik
4	Kilangan	Rp.400,843,791	Rp.420,491,787	Naik
5	Kuta Simbolong	Rp.379,404,653	Rp.375,910,733	Turun
6	Teluk Ambon	Rp.403,179,226	Rp.424,948,612	Naik
7	Rantau Gedang	Rp.408,684,815	Rp.436,555,636	Naik
8	Teluk Rumbia	Rp.423,731,074	Rp.467,790,183	Naik
9	Paya Bumbung	Rp.393,652,418	Rp.405,429,485	Naik
10	Pemuka	Rp.394,156,193	Rp.406,389,081	Naik
11	Takal Pasir	Rp.398,881,992	Rp.416,340,939	Naik
12	Selok Aceh	Rp.395,053,411	Rp.408,146,255	Naik
13	Suka Makmur	Rp.389,400,261	Rp.396,654,880	Naik
14	Ujung Bawang	Rp.404,185,675	Rp.427,213,499	Naik
15	Siti Ambia	Rp.406,388,413	Rp.431,689,929	Naik
16	Suka Damai	Rp.403,142,699	Rp.425,028,276	Naik

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 N0.380 Tahun 2019 No. 436

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dilihat jumlah alokasi dana desa di Kecamatan Singkil mengalami peningkatan dan penurunan di tahun 2018-2019 pada beberapa desa. Desa yang mengalami penurunan jumlah alokasi dana desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yaitu pada desa Pasar Singkil dan desa Kuta Simbolong. Artinya pengelolaan dana desa pada dua gampong tersebut masih kurang efektif atau tidak mencapai target/sasaran pada

tahun 2018 sehingga pada tahun 2019 jumlah alokasi dana desa mengalami penurunan dan hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini. Pengelolaan keuangan desa yang kurang baik akan berdampak pada jumlah alokasi dana desa untuk tahun selanjutnya. Pengelolaan dana desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan perkembangan kesejahteraan masyarakat luas.

Dari hasil survey awal dengan masyarakat dan aparatur di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil bahwa sistem pengelolaan keuangan dana desa yang ada di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil terjadi masalah akibat pemerintah desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang kurang terbuka (transparansi), sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai proses pengelolaannya (akuntabilitas) dan berdampak pada pengelolaan keuangan dana desa. Pergantian Kepala Desa dan aparatur membuat Program yang ada tidak terlaksanakan dengan baik seperti dalam perencanaan, pelaksanaan yang tidak tepat, kurangnya pengawasan dan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu, salah satunya seperti masih banyaknya jalan-jalan pada pemukiman warga yang rusak. Selain itu fasilitas umum di desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang belum disediakan seperti tempat musyawarah dan segala fasilitas yang berguna bagi desa juga mengakibatkan masalah yang timbul di desa ini. Kondisi seperti ini bisa membuat ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintah pada desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Dana desa ini diharapkan bisa membuat masyarakat desa sejahtera dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* diantaranya transparansi dan akuntabilitas, juga aparat desa harus memiliki pengetahuan dan pemahaman atas aturan dan Undang-undang serta mempunyai tanggung jawab yang besar. Penelitian pengelolaan dana desa di Kecamatan Aceh Singkil diharapkan sesuai dengan *Good Governance*.

Dari latar belakang alokasi dana desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah transparansi dan akuntabilitas (simultan) berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah transparansi dan akuntabilitas (Simultan) berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil
2. Untuk menguji apakah transparansi (Parsial) berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil
3. Untuk menguji apakah akuntabilitas (Parsial) berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan berupa gambaran mengenai kondisi pelaksanaan pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan dana desa khususnya di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

1.4.2 Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran, menambah wawasan mengenai pengelolaan keuangan dana desa.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas didalam pengelolaan dana desa, masyarakat bisa langsung merasakan manfaat dana desa dan masyarakat berkesempatan memberikan usulan-usulan serta menyalurkan aspirasi masyarakat agar apa yang telah disepakati benar-benar dapat direalisasikan.

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada peneliti selanjutnya khususnya mengenai penelitian pengelolaan keuangan dana desa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pengujian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Rosalinda (2017:5) Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Budi (2015:3) Menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan Pengelolaan Keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Lahirnya Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan desa pengakuan dan kekuasaan baru kepada desa yang selama ini diabaikan dalam pembangunan.

Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dikatakan bahwa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban yang dilaksanakan satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Terkait lima tahapan tersebut, berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa telah tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada masing-masing tahapan.

Tahap Perencanaan adalah alur dalam proses penganggaran desa oleh Pemerintah desa. Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) disusun oleh Pemerintah desa dan dibahas bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rancangan Peraturan desa yang telah disepakati tersebut disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. Berdasarkan hal tersebut, Bupati juga mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) kepada Camat. Apabila hasil evaluasi telah diberikan oleh Bupati dan Camat serta dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan, maka Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menetapkan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) untuk dapat dilaksanakan pada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa (APBD) dimulai ketika desa sudah menerima pendapatan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD).

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 56). Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul Desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.1.1.2 Sumber Dana Desa

Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, karena berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana ini dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
Pendapatan ini terdiri atas jenis
 - a. Hasil usaha : Hasil Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), tanah kas Desa.
 - b. Hasil asset : Pasar Desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c. Partisipasi dan gotoroyong : Peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Hasil pungutan Desa atau pendapatan lain-lain dari desa.
2. Transfer. Meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

2.1.1.3 Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan *service* kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subjek pembaharuan. Sementara itu menurut (dosenppkn.com 25 Januari 2020) tujuan desa ialah menciptakan ketentraman penduduk desa dan meningkatkan pelayanan dan prasarana umum desa.

Adapun manfaat dari adanya dana desa menurut (dosenppkn.com 25 Januari 2020) adalah:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di desa.

2.1.1.4 Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa, Darmiasih, *et al.*

(2017:8). Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu :

1. Terdapat 8 Tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
5. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Swadaya Masyarakat
2. Sumber Daya Manusia
3. Pengawasan Masyarakat
4. Perubahan Anggaran
5. Partisipasi Masyarakat

2.1.1.5 Indikator Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakn melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
4. Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan dana desa merupakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berbagai bidang pembangunan, pemberdayaan dan lainnya serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mempertanggungjawabkan dengan transparan dan efektif.

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lain yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mulyadi (2018:36) transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Di dalam penyusunan APBD, norma dan prinsip anggaran meliputi: transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan

anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran. Menurut Turalaki (2017:8) Sebagai salah satu norma dan prinsip anggaran, transparansi merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab. Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran harus dilakukan secara transparan, hal ini berarti bahwa seluruh proses penyusunan anggaran harus semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Mardiasmo. (2018:20) menyatakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut merupakan pengertian akuntabilitas publik.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk;

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan.
2. Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2016).

2.1.2.2 Indikator Transparansi

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Menurut Mardiasmo (2018:33) Indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa *dan lembaga non pemerintah*

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Menurut Mulyadi (2018:1) menyatakan akuntansi publik adalah seni (keterampilan) dan ilmu mengolah transaksi atau kejadian yang setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para pihak yang berkepentingan atas pemerintah yang nantinya akan digunakan didalam proses pengambilan keputusan publik. Menurut Mardiasmo (2018:18) menyatakan akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Menurut Bastian (2017:6) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Menurut Halim (2018:18) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai berikut : “Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”.

2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas

Mulyadi (2018:42) akuntabilitas terdapat tiga indikator yaitu : motivasi, pengabdian pada profesi, dan kewajiban sosial. Yang juga akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

1. Motivasi

Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Jika dikaitkan dengan dunia kerja motivasi merupakan dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Dengan adanya motivasi dalam bekerja, maka auditor diharapkan lebih memiliki intensitas, arah, dan ketekunan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu.

2. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi

3. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional

karena adanya pekerjaan tersebut. Jika seorang akuntan menyadari akan betapa besar perannya bagi masyarakat dan bagi profesinya, maka ia akan memiliki sebuah keyakinan bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesinya tersebut. Maka ia akan merasa berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan profesinya tersebut dengan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin.

2.2 Penelitian sebelumnya

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Weny Ultafiah, (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good governance*. Objek penelitian ini terletak pada desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, penelitian ini dilakukan Pada 19 desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Variabel dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan pengelolaan dana desa dan 2 orang masyarakat desa. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, dan data skunder yaitu data yang diperoleh dari orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara keseluruhan tidak signifikan mempengaruhi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi *Good Governance*.

Jurniadi, (2015) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipatif, transparansi, akuntabelberkelanjutan, baik secara persial maupun secara simultan terhadap efektivitas penyaluran alokasi dana desa. Objek penelitian

ini terletak pada desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipatif, transparansi, akuntabel memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel efektivitas penyaluran alokasi dana desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.

Ria Aini Rahmawati, (2016) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan Pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang terdiri dari 118 Pemerintah Kabupaten/kota Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada yang berupa laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2013 dan *website* resmi pemerintah daerah. Pemilihan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 73 Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah, dan tingkat kemakmuran berpengaruh secara positif terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul Nama Peneliti, (Tahun)	Variabel	Metode Analisis	Perbandingan		Hasil Penelitian
				Persamaan	Perbedaan	
1	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan <i>Good governance</i> di Kecamatan Merapi Barat	Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi	Analisis kuantitatif dan analisis kualitatif	Akuntabilitas, transparansi	Terletak pada penambahan variabel partisipasi dan Objek penelitian	Akuntabilitas dan transparansi secara persial tidak signifikan memengaruhi pengelolaan dana Desa untuk mewujudkan <i>goodgovernance</i>

	Kabupaten Lahat. (Weny Ultrafiah, 2017)					
2	pengaruh partisipatif, transparansi, akuntabel berkelanjutan, terhadap efektivitas penyaluran alokasi dana desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur (Jurniadi, 2015)	Partisipasi, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan	Analisis kuantitatif dan analisis kualitatif	Transparansi, akuntabel	Terletak pada penambahan variabel partisipasi variabel berkelanjutan, dan objek penelitian	Partisipatif, transparansi, akuntabel memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel efektivitas penyaluran alokasi dana Desa di Kecamatan teluk pandan Kabupaten kutai timur.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Judul Nama Peneliti, (Tahun)	Variabel	Metode Analisis	Perbandingan		Hasil Penelitian
				Persamaan	Perbedaan	
3	faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan Pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa (Ria Aini rahmawati, 2016)	Transparansi, pelaporan keuangan daerah	Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis	Transparansi	Terketak pada penambahan, variabel dengan menambahkan Pelaporan keuangan daerah, dan objek penelitian	Ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah, dan tingkat kemakmuran berpengaruh secara positif terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah

Sumber : Data Diolah 2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah penjelasan dengan dukungan data toritas atau data empiris yang diberikan oleh peneliti terhadap variabel-variabel penelitiannya serta keterkaitan antara X variabel-variabel tersebut. Kerangka fikir dapat disebut juga dengan istilah paradigma penelitian yang menggambarkan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam suatu penelitian

2.3.1 Hubungan Transparansi dengan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

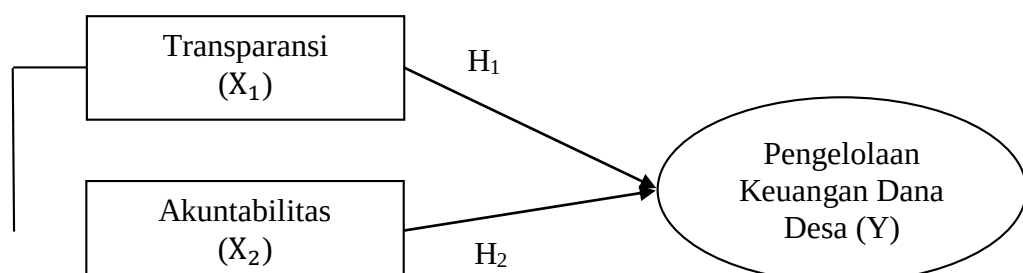
Transparansi adalah terbuka mengenai informasi kepada publik, dan apabila publik membutuhkan informasi tersebut, maka publik akan segera mendapatkannya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang. Sehingga dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut dapat terserap dengan baik.

Transparansi juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan dana desa dimana transparansi merupakan adanya keterbukaan serta melibatkan masyarakat terhadap semua informasi yang didapat melalui musyawarah rencana pembangunan serta keterbukaan informasi yang didapat dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan fenomena diatas peneliti menduga ada pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa, sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah Transparansi Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

2.3.2 Hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahman, (2020) dan Afrizal, (2019) menemukan bukti empiris bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan. Berdasarkan fenomena diatas peneliti menduga ada pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah Akuntabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Dana Desa



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

- H_1 : Diduga transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama (Simultan) berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
- H_2 : Diduga Transparansi secara individu (parsial) berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
- H_3 : Diduga Akuntabilitas secara individu (parsial) berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian itu. Nasution, (2019). Penelitian ini ditujukan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk membuktikan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen penelitian ini dilakukan langsung pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Objek penelitian adalah aparatur desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang analisisnya secara umum menggunakan data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) yang diuji menggunakan analisis statistik SPSS 25. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Singkil, kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan desa pada Kecamatan Singkil.

3.1.3 Waktu Penelitian

Menurut Suyanto dan Susila (2017:17) studi *one shot* merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu dengan satu fokus. Studi *one shot* dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode

harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan selesai.

3.1.4. Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis, antara lain meliputi analisis individual. Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Berdasarkan unit observasi yang dijadikan unit analisis dari penelitian ini adalah individu Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 48 terdiri dari sekretaris desa, bendahara dan kepala urusan (Kaur) pembangunan.

2. Sampel

Sampel adalah total populasi dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut . Jenis sampel dalam penelitian ini adalah jenis sampel *non probability* yaitu pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Nama Desa	Sekretaris Desa	Bendahara Desa	Kaur Pembangunan	Jumlah
1	Pasar Singkil	1	1	1	3
2	Kampung Ujung	1	1	1	3
3	Pulo Sarok	1	1	1	3
4	Kilangan	1	1	1	3
5	Kuta Simboling	1	1	1	3
6	Teluk Ambun	1	1	1	3
7	Rantau Gedang	1	1	1	3

Lanjutan Tabel 3.1

No	Nama Desa	Sekretaris Desa	Bendahara Desa	Kaur Pembangunan	Jumlah
8	Teluk Rumbia	1	1	1	3
9	Paya Bumbung	1	1	1	3
10	Pemuka	1	1	1	3
11	Takal Pasir	1	1	1	3
12	Selok Aceh	1	1	1	3
13	Suka Makmur	1	1	1	3
14	Ujung Bawang	1	1	1	3
15	Siti Ambia	1	1	1	3
16	Suka Damai	1	1	1	3
Jumlah		16	16	16	48

Sumber: Data Diolah 2022

1.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data premier adalah sumber data yang berlangsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2018;193).

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara (Sugiyono, 2018) sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.4 Defenisi dan Operasional Variabel

Oprasional variabel adalah penelitian yang menjelaskan tentang jenis variabel serta gambaran dari variabel yang diteliti berupa nama variabel, definisi variabel, indikator variabel, ukuran variabel, skala pengukuran dan referensi yang digunakan peneliti. Kuesioner dalam penelitian ini di ukur dengan interval (Likert). Adapun yang dimaksud dengan skala likert ialah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap maupun pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah fenomena sosial berdasarkan oprasional peneliti. Skala ini merupakan skala psikometrik yang bisa diaplikasikan dalam angket dan sering digunakan untuk riset yakni berupa survei dan termasuk dalam penelitian survey deskriptif.

Adapun definisi operasional yang dimaksud adalah:

a. Transparansi (X_1)

Menurut Mardiasmo (2018:33) transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan skala 5 poin untuk menunjukkan bahwa seberapa jauh Transparansi telah dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan Daerah.

b. Akuntabilitas (X_2)

Akuntabilitas keuangan Daerah adalah merupakan proses pengelolaan keuangan Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penantausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Mulyadi, 2018:42). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan skala 5 poin untuk menunjukkan bahwa seberapa jauh akuntabilitas keuangan Daerah telah dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa.

c. Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pengelolaan keuangan desa adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Tabel 3.2
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran	Skala	Item Pertanyaan	Referensi
Pengelolaan keuangan desa (Y)	Pengelolaan keuangan desa adalah pengurusan proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.	• Perencanaan • Pelaksanaan • Penatausahaan • Pelaporan • Pertanggung jawaban	1-5	Likert	A1-A5	(Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015)

Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran	Skala	Item Pertanyaan	Referensi
Transparansi (X ₁)	Transparansi adalah kewajiban bagi pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi	• Memberikan informasi • Dokumen-dokumen yang dipublikasi • Selalu tepat waktu • Usulan masyarakat selalu diakomodasi • Kemudahan dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran • Adanya sistem pemberian informasi kepada publik	1-5	Likert	B1-B6	(Mardiasmo, 2018:33)
Akuntabilitas (X ₂)	Akuntabilitas keuangan Daerah adalah proses pengelolaan keuangan Daerah dari perencanaan, pelaksanaan, penantusiasaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya	• Motivasi • Pengabdian dan proses • Kewajiban sosial	1-5	Likert	C1-C6	(Mulyadi, 2018:42)

Sumber: Data Diolah 2022

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Pengujian Kualitas Data

Sebelum melakukan analisis data dengan kuantitatif korelasi menggunakan teknik analisis uji regresi sederhana, maka harus dilakukan beberapa uji persyarat yakni :

3.5.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghazali, (2016) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas angket dilakukan dengan menggunakan *correlation person* yaitu mengkorelasikan skor item masing-masing nomor dengan total skor item, peneliti hanya akan menggunakan soal-soal yang terbukti valid dari hasil analisis instrumen. Hasil analisis perhitungan validitas butir soal (sig) dikonsultasikan dengan α (0.05) , dengan taraf signifikan 5 %. Bila harga $\text{sig} > \alpha$ maka butir soal tersebut dikatakan valid. Sebaliknya bila harga $\text{sig} > \alpha$ maka butir soal tersebut dikatakan tidak valid.

Perhitungan validitas item angket dilakukan dengan penafsiran koefisien korelasi, yakni r_{xy}^{hitung} dibandingkan dengan r_{xy}^{tabel} . Adapun nilai r_{xy}^{tabel} untuk validitas item angket adalah 0,5. Artinya, apabila sig lebih besar atau sama dengan 0,5 ($r_{xy} \geq 0,5$), maka item angket tersebut dapat dikatakan valid.

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas, peneliti melanjutkan uji reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas angket, digunakan perhitungan dengan teknik *Alpha Cronbach's*. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2016).

Dalam penelitian ini, uji keandalan setiap variabel diukur dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*. Ada dua alasan peneliti menggunakan uji *Cronbach's Alpha*. Pertama, karena teknik ini merupakan teknik pengujian keandalan kuesioner yang paling sering digunakan. Kedua, dengan melakukan uji *Cronbach's Alpha* maka akan terdeteksi indikator-indikator yang tidak konsisten. Reliabilitas instrument adalah tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh kuesioner, meskipun digunakan secara berulang-ulang. Pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung *Cronbach Alpha* masing-masing variabel yang terlibat. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Uji ini dimaksudkan untuk menunjukkan banyaknya variansi atau perbedaan yang diharapkan pada seperangkat pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap suatu objek. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0,60 (Ghozali, 2016).

Perhitungan angket dilakukan dengan cara mengkonsultasikan koefisien reliabilitas hitung nilai kritik atau standar reliabilitas. Adapun nilai kritik untuk reliabilitas angket adalah 0,5. Artinya, apabila nilai kritik untuk reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,5 ($r_i \geq 0,5$), maka angket tersebut dikatakan reliabil Josep F Hair, (1998).

3.5.1.2 Uji Asumsi Dasar

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data menurut Ghozali (2016:110) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis gambar berupa plot dan uji statistik dengan melihat nilai kurtosis dan skewness.

Kenormalan data-data dapat dilihat dari tampilan gambar normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2016:110). Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui kenormalan distribusi sebaran skor variabel apabila terjadi penyimpangan tersebut. Dalam penelitian untuk menguji normalitas data, peneliti menggunakan rumus *Kolmogrov-Smirnov* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika Signifikansi (Significance level) > 0.05 maka Distribusi normal.
- b) Jika signifikansi (Significance level) < 0.05 maka distribusi tidak normal.

Ghozali, (2016).

b. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk menguji bahwa setiap kelompok yang akan dibandingkan memiliki variansi yang sama. Ghozali, (2016) untuk mengetahui apakah kedua variansi tersebut homogen, maka dilakukan uji F (*Fisher*) dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{\text{Varian Terbesar}}{\text{Varian Terkecil}}$$

Perhitungan uji homogenitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ dan $dk_{pembilang} = n_a - 1$ dan $dk_{penyebut} = n_b - 1$. Apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka kedua kelompok data tersebut memiliki varian yang sama atau homogen. Dalam pengelolaan data selanjutnya akan digunakan alat bantu program SPSS IBM Versi 25.

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam model regresi yang digunakan. Semakin kecil korelasi diantara variabel bebasnya maka semakin baik model regresi yang akan diperoleh. metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yaitu dengan menggunakan Tolerance dan Varianceinflation Faktor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas (Ghozali, 2016).

d. Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda merupakan analisis statistika yang bertujuan mencari model linier antara variabel bebas (independen) atau regresor terhadap variabel respons atau dependen. Sugiyono (2018). Data penelitian dianalisis dengan menggunakan model regresi linier sederhana dan diolah dengan menggunakan program bantuan SPSS (*Statistic Pagcket for Social Saince*) versi 22. Adapun model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e$$

Dengan :

Y = Pengelolaan Keuangan Daerah

B_0 = konstanta

β_1, β_2 = koefisien regresi masing-masing variabel

X1 = Transparansi

X2 = Akuntabilitas

e. Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikannya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Selain itu dapat juga dengan cara membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Ghazali, (2016).

f. Uji F

Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model atau goodness of fit, apakah model persamaan yang terbentuk masuk dalam kriteria cocok (fit) atau tidak. Uji F ini sering disebut sebagai uji simultan, yaitu untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori atau tidak

3.6 Pengujian Hipotesis

Suatu hipotesis biasanya merupakan hasil dari dugaan berdasarkan pengamatan rutinitas dan gejala alam ataupun berdasarkan teori. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih

sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataan dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataan.

Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak, maka yang lain akan diterima sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu jika H_0 ditolak maka H_a diterima atau sebaliknya. Uji hipotesis analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi (Sugiyono, 2018).

Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. \ Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), terhadap pengelolaan keuangan dana desa (Y).

Pengujian hipotesis merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Rancangan tersebut dinyatakan dalam hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a), yaitu:

1) Hipotesis Pertama

H_{01} : Transparansi dan akuntabilitas, tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa

H_{01} : Transparansi dan akuntabilitas, berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa

2) Hipotesis Kedua

H_{02} : Transparansi tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa

H_{a2} : Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa

3) Hipotesis Ketiga

H_{O3} : Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa

H_{a3} : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa

Untuk menerima atau menolak ketiga hipotesis dalam penelitian ini, maka dilihat hasil output SPSS. Kemudian output tersebut dimasukan ke kriteria menerima atau menolak hipotesis. Kriteria ini berpedoman pada Gani (2015:9) dan Supranto (2009:190). Paparan kriteria menerima atau menolak hipotesis akan diuraikan berikut ini:

1) Kriteria menerima atau menolak hipotesis pertama

- Jika semua koefisien regresi sama dengan nol ($\beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$), maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak. Artinya Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.
- Jika salah satu dari koefisien regresi tidak sama dengan nol ($\beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$), maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

2) Kriteria menerima atau menolak hipotesis kedua:

- Jika koefisien regresi variabel X_1 sama dengan nol ($\beta_1=0$), maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Artinya Transparansi tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

- Jika koefisien regresi X_1 tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$), maka H_{01} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.
- 3) Kriteria menerima atau menolak hipotesis ketiga:
- Jika koefisien regresi X_2 sama dengan nol ($\beta_2 = 0$), maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Artinya Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.
 - Jika koefisien regresi X_2 tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$), maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

Singkil adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Indonesia. Singkil juga merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan

. Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu Kabupaten dari 23 Kabupaten yang berada dalam Propinsi Aceh, yang dimekarkan dari Kabupaten Aceh Selatan, dan terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya UndangUndang No.14 tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Namun pada tanggal 2 Januari tahun 2007 terjadi pemekaran dengan terbentuknya kota Subulussalam menjadi Pemerintah Kota. Luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil seluas 2.187 KM², terdiri dari 12 Kecamatan, 120 desa/kelurahan. Posisi Kabupaten Aceh Singkil terletak pada 20 02'–20 27'30" Lintang Utara dan 97 04'–97 45' 00 Bujur Timur. Kabupaten Aceh Singkil berada di ujung selatan Provinsi Aceh di Pulau Sumatera, sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terdiri dari dua wilayah yakni daratan dan kepulauan.

4.2 Karakteristik Responden

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan jenis kelamin, umur, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan terakhir dan pendapatan rata-rata perbulan yang terlihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Usia		
	a. 20-25 Tahun	3	6,3
	b. 26-35 Tahun	4	8,3
	c. 36-45 Tahun	12	25,0
	d. 46-55 Tahun	24	50,0
	e. >56 Tahun	5	10,4
Total		48	100,0
2	Jenis kelamin		
	a. Pria	40	83,3
	b. Wanita	8	16,7
Total		48	100,0
3	Status Perkawinan		
	a. Belum Menikah	11	22,9
	b. Menikah	37	77,1
Total		48	100,0
4.	Pendidikan Terakhir		
	a. SLTA	28	58,3
	b. Diploma	7	14,6
	c. Sarjana	13	27,1
	d. pascasarjana	-	-
Total		48	100,0
5.	Pendapatan Rata-rata Perbulan		
	a. < Rp 2.000.000	16	33,3
	b. Rp 2.100.000-Rp3.999.999	20	41,7
	c. Rp 4.000.000 -Rp4,999,999	11	22,9
	d. Rp 5.100.000- Rp5.999.999	1	2,1
Total		48	100,0

Sumber: Hasil Penelitian, 2022 (Data diolah)

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berusia antara 20 sampai 25 tahun sebanyak 3 responden atau 6,3%, yang berusia antara 26 sampai dengan 35 tahun yaitu sebanyak 4 responden atau 8,3%, yang berusia antara 36 sampai dengan 45 tahun yaitu sebanyak 12 responden atau 25%, yang berusia antara 46 sampai dengan 55 tahun sebanyak 24 responden atau 50% dan yang berusia 56 tahun ke atas 5 responden atau 10,4%.

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 40 responden atau 83,3% dan responden berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 8 responden atau 16,7%. Karakteristik berdasarkan status perkawinan dapat dijelaskan yang belum menikah adalah sebanyak 11 responden atau 22,9% dan yang sudah menikah 37 responden atau 77,1%.

Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan yang berpendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 28 responden atau 58,3%, yang berpendidikan terakhir Diploma yaitu sebanyak 7 responden atau 14,6% dan yang berpendidikan terakhir sarjana yaitu sebanyak 13 responden atau 27,1%.

Mengenai tingkat pendapatan responden dapat dijelaskan bahwa sebanyak 16 responden atau 33,3% mempunyai tingkat pendapatan di bawah Rp. 2.000.000, sebanyak 20 responden atau 41,7% mempunyai tingkat pendapatan Rp. 2.100.000-3.999.999, sebanyak 11 responden atau 22,9% dengan pendapatan Rp. 4.000.000-4.999.999 dan sebanyak 1 responden atau 2,1% dengan pendapatan Rp. 5.000.000-5.999.999.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Uji Validitas Instrumen

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *pearson product-moment coefficient of correlation* dengan bantuan SPSS. Hasil Uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

No pertanyaan		Variabel	Koefisien korelasi	Nilai kritis 5 % (N=48)	Ket
1	A1	Pengelolaan keuangan dana desa (Y)	0,839	0,284	Valid
2	A2		0,731	0,284	Valid
3	A3		0,746	0,284	Valid
4	A4		0,792	0,284	Valid
5	A5		0,733	0,284	Valid
6	B1	Transparansi (X ₁)	0,679	0,284	Valid
7	B2		0,825	0,284	Valid
8	B3		0,760	0,284	Valid
9	B4		0,488	0,284	Valid
10	B5		0,857	0,284	Valid
11	B6		0,663	0,284	Valid
12	C1	Akuntabilitas (X ₂)	0,844	0,284	Valid
13	C2		0,771	0,284	Valid
14	C3		0,743	0,284	Valid
15	C4		0,808	0,284	Valid
16	C5		0,736	0,284	Valid
17	C6		0,844	0,284	Valid

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan semuanya valid, karena mempunyai koefisien korelasi diatas dari nilai kritis korelasi *product moment* yaitu sebesar 0,284

sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

Semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5 % yaitu di atas 0,284, sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas. Atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi (*internal consistence*) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian.

4.3.2. Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan internal *consistency* atau derajat ketepatan jawaban. Untuk pengujian ini digunakan *Statistical Packaged for Social Sciences* (SPSS). Setelah melakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban tentang tanggapan responden. Untuk melakukan pengujian reliabilitas penulis menggunakan program SPSS.

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Item Variabel	Nilai Alpha	Kehandalan
1.	Pengelolaan keuangan dana desa (Y)	5	0,906	Handal
2.	Transparansi (X ₁)	6	0,886	Handal
3.	Akuntabilitas (X ₂)	6	0,927	Handal

Sumber: Data diolah (2022)

Hasil uji Reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach Alpha, nilai *cronbach alpa reliabilitas* yang baik adalah yang makin mendekati 1, Reliabilitas yang kurang dari 0,60 adalah kurang baik, sedangkan lebih dari 0,60 dapat diterima dan reliabilitas dengan *cronbach alpa* 0,80 atau diatasnya adalah baik. Dari hasil pengujian

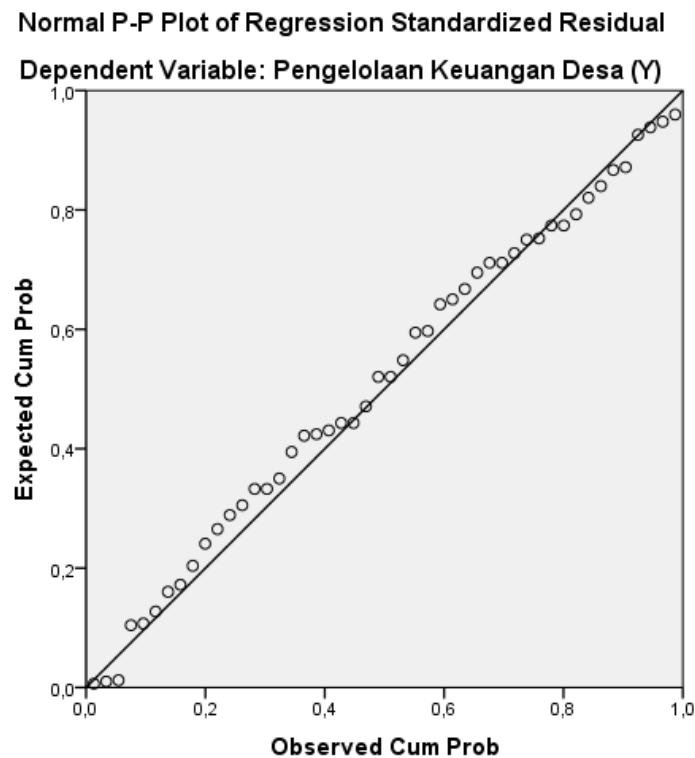
reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa reliabilitas variabel keputusan pembelian berdasarkan pengujian reliabilitas dari instrumen, diketahui bahwa hasil pengujian variabel transparansi, akuntabilitas dan seluruhnya adalah reliabel karena melebihi dari 0,60.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Untuk pengujian normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui Analisis Grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Penelitian, 2022 (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan menunjukkan indikasi normal. Analisis dari grafik diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. “Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi-asumsi normalitas”. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi Niat beli berdasarkan masukan variabel independen.

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Pada model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.4:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Toleransi	VIF	Keterangan
Transparansi (X_1)	0,772	3,905	Non Multikolinieritas
Akuntabilitas (X_2)	0,772	3,905	Non Multikolinieritas

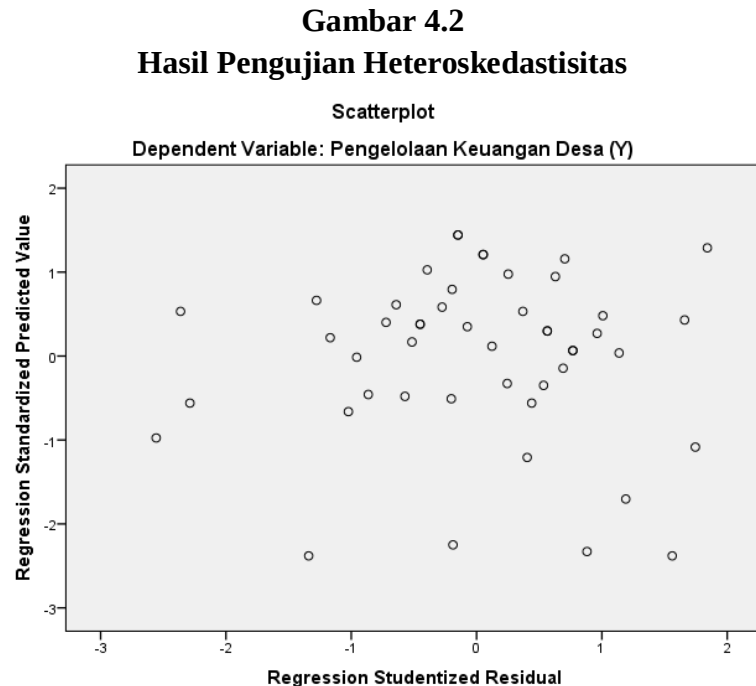
Sumber: Hasil Penelitian, 2022 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 maka dapat menunjukkan bahwa tidak ada satu variable independen yang memiliki nilai Tolerance yang kurang dari 0,10 berarti tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor*

(VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

4.3.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan mengamati pola yang terdapat pada Scatterplot, dimana hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.2:



Sumber: Hasil Penelitian, 2022 (Data diolah)

Dari Gambar 4.2 uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Deskriptif

Penelitian ini mengamati tiga variabel bebas (*independent variabel*) yaitu variabel transparansi (X_1), variabel akuntabilitas (X_2) dan juga mengamati satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu pengelolaan keuangan dana desa (Y).

4.4.1 Variabel Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Penjelasan responden tentang variabel pengelolaan keuangan dana desa pada dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengelolaan Keuangan Dana Desa

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Pengelolaan dana desa terlebih dahulu dengan adanya musyawarah dan perencanaan masyarakat	0	0	6	12,5	12	25,0	22	45,8	8	16,7	3,67
2	Pelaksanaan dana desa sudah sesuai prosedur	0	0	6	12,5	16	33,3	18	37,5	8	16,7	3,58
3	Penataanusahaan dana desa sudah sesuai dengan prosedur	0	0	3	6,3	8	16,7	23	47,9	14	29,2	4,00

Tabel 4.5 Lanjutan

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
4	Setiap tahun pihak aparaturnya membuat laporan penggunaan pengelolaan dana desa	0	0	5	10,4	7	14,6	22	5,8	14	29,2	3,94
5	Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparaturnya sudah tepat	0	0	1	2,1	6	12,5	31	64,6	10	20,8	4,04
Rata-rata												3,85

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel di atas pada indikator pertama bahwa pengelolaan dana desa terlebih dahulu dengan adanya musyawarah dan perencanaan masyarakat diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,67 yang berarti responden menyatakan setuju. Pelaksanaan dana desa sudah sesuai diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,58 yang berarti responden menyatakan setuju. Penatausahaan dana desa sudah sesuai dengan prosedur diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,00 yang berarti responden menyatakan setuju. Setiap tahun pihak aparaturnya membuat laporan penggunaan pengelolaan dana desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,94 yang berarti responden menyatakan setuju. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparaturnya sudah tepat diperoleh nilai rata-rata 4,04 yang berarti responden menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel pengelolaan keuangan dana desa sebesar 3,85 artinya responden menyatakan setuju dengan pernyataan yang ada pada kuisioner karena skala likert mendekati angka 4.

4.4.2 Variabel Transparansi

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai transparansi dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Transparansi

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Responden dapat memberikan informasi kepada public mengenai laporan keuangan	0	0	3	6,3	8	16,7	23	29,2	14	29,2	4,00
2	Dokumen yang dipublikasi kepada masyarakat sudah sesuai dengan kinerja aparatur	0	0	5	10,4	7	14,6	22	45,8	14	29,2	3,94
3	Responden dapat melakukan publikasi laporan keuangan selalu tepat waktu	0	0	1	2,1	6	12,5	31	64,6	10	20,8	4,04
4	Usulan pembangunan yang dilaporkan masyarakat selalu dipertimbangan dengan baik	0	0	10	20,8	10	20,8	18	37,5	10	20,8	3,58
5	Kemudahan dalam mengakses dokumen dapat memudahkan responden menyelesaikan tugas dan laporan kepada publik	0	0	6	12,5	12	25,0	22	45,8	8	16,7	3,67
6	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik menjadi salah satu sifat yang terbuka kepada masyarakat	0	0	6	12,5	16	33,3	18	37,5	8	16,7	3,58
Rata-rata												3,80

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan indikator yang pertama yaitu Responden dapat memberikan informasi kepada public mengenai laporan keuangan diperoleh nilai rata-rata 4,00 yang berarti responden menyatakan setuju. Dokumen yang dipublikasi kepada masyarakat sudah sesuai dengan kinerja aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,94 yang berarti responden menyatakan setuju. Responden dapat melakukan publikasi laporan keuangan selalu tepat waktu diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,04 yang berarti responden menyatakan setuju. Usulan pembangunan yang dilaporkan masyarakat selalu dipertimbangan dengan baik diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,58 yang berarti responden menyatakan kurang setuju. Kemudahan dalam mengakses dokumen dapat memudahkan responden menyelesaikan tugas dan laporan kepada publik diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,67 yang berarti responden menyatakan setuju. Adanya sistem pemberian informasi kepada publik menjadi salah satu sifat yang terbuka kepada masyarakat diperoleh nilai rata-rata 3,58, yang berarti responden menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel transparansi sebesar 3,80 artinya responden menyatakan setuju dengan pernyataan yang ada pada kuisioner karena skala likert mendekati angka 4.

4.4.3 Variabel Akuntabilitas

Hasil penelitian tentang penjelasan responden terhadap variabel akuntabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Prosedur akuntabilitas keuangan daerah dapat meningkatkan motivasi kerja responden	0	0	3	6,3	8	16,7	23	47,9	14	29,2	4,00
2	Prosedur akuntabilitas keuangan yang diterapkan sesuai dengan kemampuan responden	0	0	5	10,4	7	14,6	22	5,8	14	29,2	3,94
3	Responden dapat menyelesaikan tugas dengan melakukan proses laporan yang baik	0	0	1	2,1	6	12,5	31	64,6	10	20,8	4,04
4	Responden membuat laporan keuangan dengan tepat waktu	0	0	6	12,5	12	25,0	22	45,8	8	16,7	3,67
5	Pertanggungjawaban laporan keuangan merupakan salah satu tanggung jawab responden kepada masyarakat dan pemerintah	0	0	6	12,5	16	33,3	18	37,5	8	16,7	3,58
6	Semua laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu	0	0	3	6,3	8	16,7	23	47,9	14	29,2	4,00
Rata-rata												3,93

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan indikator yang pertama yaitu Prosedur akuntabilitas keuangan daerah dapat meningkatkan motivasi kerja responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,00 yang berarti responden menyatakan setuju. Prosedur akuntabilitas keuangan yang diterapkan sesuai dengan kemampuan

responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,94 yang berarti responden menyatakan setuju. Responden dapat menyelesaikan tugas dengan melakukan proses laporan yang baik diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,04 yang berarti responden menyatakan setuju. Responden membuat laporan keuangan dengan tepat waktu diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,67 yang berarti responden menyatakan setuju. Pertanggung jawaban laporan keuangan merupakan salah satu tanggung jawab responden kepada masyarakat dan pemerintah diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,58 yang berarti responden menyatakan setuju. Semua laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan dengan tepat waktu diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,00 yang berarti responden menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel akuntabilitas sebesar 3,93 artinya responden menyatakan setuju dengan pernyataan yang ada pada kuisioner karena skala likert mendekati angka 4.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengujian Hipotesis

Hipotesis menyatakan bahwa faktor-faktor transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2) dan berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan dana desa pada kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Model yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut adalah:

Tabel 4.8
Pengaruh variabel bebas terhadap Pengelolaan keuangan dana desa

Nama variabel	B	Std Error	t_{hitung}	Sig.
Konstanta	2,015	0,445	4,538	0,000
Transparansi (X_1)	0,282	0,045	6,229	0,000
Akuntabilitas (X_2)	0,724	0,043	16,681	0,000

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil SPSS seperti terlihat tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut,

$$Y = 2,015 + 0,282X_1 + 0,724X_2$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1) Koefisien Regresi (β)

- a. Dalam penelitian nilai konstanta adalah 2,015 artinya bila mana transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2), dianggap konstan, maka pengelolaan keuangan dana desa pada kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, adalah sebesar 2,015 pada satuan skala likert
- b. Koefisien regresi transparansi (X_1) sebesar 0,282. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel transparansi akan meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa pada kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebesar 28,2% dengan asumsi variabel akuntabilitas (X_2) dianggap konstan.
- c. Koefisien regresi akuntabilitas (X_2) sebesar 0,724. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel akuntabilitas secara relatif akan meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa pada kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebesar 72,4% dengan asumsi variabel transparansi (X_1) dianggap konstan.

2) Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat antara lain:

Tabel 4.9
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,997 ^a	0,994	0,994	0,07441

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan dari output komputer diatas maka diperoleh koefisien korelasi dalam penelitian diperoleh nilai sebesar 0,997 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 99,7%. Artinya faktor transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Sementara itu koefisien determinasi yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,994 artinya bahwa sebesar 99,4% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (pengelolaan keuangan dana desa pada kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2). Sedangkan selebihnya sebesar 0,6% dijelaskan oleh faktor-

faktor lain diluar tiga variabel seperti dijelaskan di atas seperti kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pengawasan.

4.5.2. Pengujian Secara Simultan dan Parsial

Untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara bersama maupun secara parsial terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Dalam uji bersama-sama dapat dilihat dengan cara berikut:

1. Secara bersama-sama

$H_1 : \beta_1 = 0,282, \beta_2 = 0,724$, maka $\beta_1, 2, \neq 0$, : Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

2. Secara parsial

$H_2 : H_1 : \beta_1 = 0,282, \beta_1 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya transparansi secara parsial berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

$H_3 : H_2 : \beta_2 = 0,724, \beta_2 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nul (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

4.5.2.1 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa Pada kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Artinya hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Ulfiah (2017) dan Jurniadi (2015) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Akuntabilitas merupakan istilah yang melekat dalam kajian tata pemerintahan (*governance*). Akuntabilitas memiliki beberapa makna yang terminologinya sering dikaitkan dengan beberapa konsep seperti *answerability*, *responsibility*, *liability* dan terminologi lain yang berkaitan dengan harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat.

Faktor penting lainnya sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi pinggiran di desa adalah keberadaan dan pemanfaatan dana desa. Program desa akan berjalan sesuai target waktu dan sesuai harapan apabila didukung oleh dana desa yang akan memperlancar proses pembangunan di desa. Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

4.5.2.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa Pada kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Artinya hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Ultafiah (2017) dan Jurniadi (2015) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh pengelolaan keuangan dana desa. Transparansi juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan dana desa dimana transparansi merupakan adanya keterbukaan serta melibatkan masyarakat terhadap semua informasi yang didapat melalui musyawarah rencana pembangunan serta keterbukaan informasi yang didapat dan keterlibatan masyarakat. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang. Sehingga dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut dapat terserap dengan baik.

4.5.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa Pada kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Artinya hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Ultafiah (2017) dan Jurniadi (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh pengelolaan keuangan dana desa. Dalam konteks politik, secara singkat *accountability* mencakup harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi mandat dan penerima mandat, sedangkan dalam konsep yang lebih luas *accountability* memungkinkan adanya negative feedback setelah keputusan atau tindakan diambil, sehingga *accountability* memiliki fungsi yang amat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana, dan anggaran publik oleh suatu institusi. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai dari konteks politik. Dalam konteks kebijakan pun

dapat dilihat bagaimana mandat itu dilaksanakan untuk memenuhi aspirasi politik masyarakat. Segala hal yang meliputi cara pilihan kebijakan ditetapkan, cara kebijakan dilaksanakan dan didelegasikan, bagaimana kewenangan diberikan, dan bagaimana program dilaksanakan adalah sepenuhnya berdasarkan pada konteks-tualitas politik. Jika pemahamannya seperti itu maka konsep ini tidak lain merupakan konsekuensi politik dari akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal A, (2019). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu*.
- Arifiyanto, Dwi Febri., & Kurrohman, Tufik (2014). “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*”. *Jurnal Riset dan Akuntansi Keuangan*, 2 (3), 473-485.
- Bastian, Indra. (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budi, Santoso. (2015). *Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*.Bogor :Ghalia Indonesia.
- Deddy dan Riyadi. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: SUN
- Dewi, D. P. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 26. No. 2*
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim dan Kusufi. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Jurniadi, (2015). pengaruh partisipatif, transparansi, akuntabelberkelanjutan, baik secara persial maupun secara simultan terhadap efektivitas penyaluran alokasi dana desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No.1
- Karimayumi, Riska (2020). “*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Seisuka Deras Kecamatan Seisuka Kabupaten Batubara*”.Skripsi. Medan: UMSU Medan.
- Mahmudi (2016).*Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Rvwisi. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2018). *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu. Manajemen YKPN.
- Oktavia, Norni (2020). “*Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma*”. Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Alokasi Dana Desa 2018.

- Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Alokasi Dana Desa 2019.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 *tentang Indeks Desa Membangun*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Prayudi, P. A. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kemampuan Kerja Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Seririt). *e-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol: 8 No: 2*
- Ria Aini Rahmawati, (2016). faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. *Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No.1*
- Sekaran, Uma. (2019). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku Dua, Edisi Keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. (2018). *Statistika untuk Penelitian*. penerbit Alfabeta, Bandung.
- Tahir, E. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur*

Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi). Skripsi Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari

Turalaki, Shinta. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Vol.5 No.2*

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI No. 6 Tentang Desa 2014.

Weny Utafiah, (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa pada desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No.1

KUISIONER

Kuisisioner ini dimaksudkan untuk penulisan karya akhir yang bersifat ilmiah sebagai persyaratan tugas akhir pada Universitas Muhammadiyah Aceh, yang difokuskan pada bidang manajemen.

Petunjuk pengisian : Beri tanda (√) pada *coulum*, yang sesuai dengan pertanyaan yang dipilih berdasarkan kondisi instansi anda.

1. Identitas Responden

1. Umur anda

- a. 21-25 Tahun ☐
- b. 26-35 Tahun ☐
- c. 36-45 Tahun ☐
- d. 46-55 Tahun ☐
- e. > 56 Tahun ☐

2. Jenis kelamin anda

- a. Pria ☐
- b. Wanita ☐

3. Status perkawinan

- a. Belum menikah ☐
- b. Menikah ☐

4. Tingkat Pendidikan

- a. SLTA ☐
- b. Diploma III ☐
- c. Sarjana (S1) ☐
- d. Pasca Sarjana (S2) ☐
- e. Doktor (S3) ☐

5. Penghasilan perbulan

- a. <Rp. 2.000.000 ☐
- b. Rp. 2.100.000-3.999.999 ☐
- c. Rp. 4.000.000-4.999.999 ☐
- d. Rp. 5.000.000-5.999.999 ☐
- e. >Rp. 6.000.000 ☐

Keterangan

Sangat tidak setuju	1
Tidak setuju	2
Kurang setuju	3
Setuju	4
Sangat setuju	5

a. Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

No	URAIAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Pengelolaan dana desa terlebih dahulu dengan adanya musyawarah dan perencanaan masyarakat					
2	Pelaksanaan dana desa sudah sesuai					
3	Penataanusahaan dana desa sudah sesuai dengan prosesudr					
4	Setiap tahun pihak aparaturnya membuat laporan penggunaan pengelolaan dana desa					
5	Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparaturnya sudah tepat					

b. Transparansi (X₁)

No	URAIAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya dapat memberikan informasi kepada public mengenai laporan keuangan					
2	Dokumen yang dipublikasi kepada masyarakat sudah sesuai dengan kinerja aparaturnya					
3	Saya dapat melakukan publikasi laporan keuangan selalu tepat waktu					
4	Usulan pembangunan yang dilaporkan masyarakat selalu dipertimbangan dengan baik					
5	Kemudahan dalam mengakses dokumen dapat memudahkan saya menyelesaikan tugas dan laporan kepada publik					
6	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik menjadi salah satu sifat yang terbuka kepada msyarakat					

c. Akuntabilitas (X₂)

No	URAIAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Prosedur akuntabilitas keuangan daerah dapat meningkatkan motivasi kerja saya					
2	Prosedur akuntabilitas keuangan yang diterapkan sesuai dengan kemampuan saya					
3	Saya dapat menyelesaikan tugas dengan melakukan proses laporan yang baik					
4	Saya membuat laporan keuangan dengan tepat waktu					
5	Pertanggungjawaban laporan keuangan merupakan salah satu tanggung jawab saya kepada masyarakat dan pemerintah					
6	Semua laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu					

☆ Terima Kasih Atas Kerja Sama Bapak/Ibu ☆

Lampiran 2 Tabulasi Data Jawaban Kuisiner

NO	Identitas					Indikator					Y	Indikator						X1	Indikator						X2
	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	A1	A2	A3	A4	A5		B1	B2	B3	B4	B5	B6		C1	C2	C3	C4	C5	C6	
1	4	1	2	3	1	4	3	3	5	5	4	3	5	5	5	4	3	4,167	3	5	5	4	3	3	3,833
2	4	1	2	1	2	3	3	3	3	4	3,2	3	3	4	5	3	3	3,5	3	3	4	3	3	3	3,167
3	3	1	2	2	2	4	4	5	4	4	4,2	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4,333
4	5	1	2	3	2	3	3	3	4	3	3,2	3	4	3	4	3	3	3,333	3	4	3	3	3	3	3,167
5	4	2	2	2	3	4	3	4	4	4	3,8	4	4	4	4	4	4	3,833	4	4	4	4	3	4	3,833
6	2	1	1	2	2	4	4	4	4	5	4,2	4	4	5	2	4	4	3,833	4	4	5	4	4	4	4,167
7	4	2	2	1	3	3	4	3	4	3	3,4	3	4	3	4	3	4	3,5	3	4	3	3	4	3	3,333
8	4	1	2	1	2	4	4	5	5	4	4,4	5	5	4	3	4	4	4,167	5	5	4	4	4	5	4,5
9	3	1	1	1	3	3	4	5	4	4	4	5	4	4	2	3	4	3,667	5	4	4	3	4	5	4,167
10	3	1	1	1	1	5	5	4	4	5	4,6	4	4	5	5	5	5	4,667	4	4	5	5	5	4	4,5
11	4	1	2	2	2	3	4	4	5	3	3,8	4	5	3	3	3	4	3,667	4	5	3	3	4	4	3,833
12	4	2	2	1	1	2	4	4	2	2	2,8	4	2	2	2	2	4	2,667	4	2	2	2	4	4	3
13	5	1	2	1	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	2	3	4	3,667	5	4	4	3	4	5	4,167
14	4	1	2	3	1	3	4	4	4	4	3,8	4	4	4	2	3	4	3,5	4	4	4	3	4	4	3,833
15	3	1	1	1	2	3	2	4	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3,167	4	3	3	3	2	4	3,167
16	3	1	2	1	1	4	3	2	4	4	3,4	2	4	4	4	4	3	3,5	2	4	4	4	3	2	3,167
17	3	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	3	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4,5	5	5	5	5	5	5	5
19	1	1	1	1	2	2	3	4	2	4	3	4	2	4	2	2	3	2,833	4	2	4	2	3	4	3,167
20	2	1	2	1	1	4	3	4	2	4	3,4	4	2	4	4	4	3	3,5	4	2	4	4	3	4	3,5
21	4	1	2	1	3	4	4	4	5	4	4,2	4	5	4	4	4	4	4,167	4	5	4	4	4	4	4,167
22	4	1	2	1	3	4	4	3	4	4	3,8	3	4	4	4	4	4	3,833	3	4	4	4	4	3	3,667
23	5	1	2	3	1	5	5	5	4	4	4,6	5	4	4	4	5	5	4,5	5	4	4	5	5	5	4,667
24	5	1	2	1	3	3	4	3	4	4	3,6	3	4	4	4	3	4	3,667	3	4	4	3	4	3	3,5
25	4	1	2	3	1	3	3	4	2	4	3,2	4	2	4	2	3	3	3	4	2	4	3	3	4	3,333
26	4	2	2	3	2	2	2	4	4	4	3,2	4	4	4	3	2	2	3,167	4	4	4	2	2	4	3,333
27	4	1	2	1	2	4	3	5	4	5	4,2	5	4	5	4	4	3	4,167	5	4	5	4	3	5	4,333
28	4	1	2	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	3	1	2	3	1	4	3	4	3	4	3,6	4	3	4	4	4	3	3,667	4	3	4	4	3	4	3,667
30	4	1	2	1	2	3	3	5	4	5	4	5	4	5	5	3	3	4,167	5	4	5	3	3	5	4,167
31	4	1	2	3	3	4	4	4	3	4	3,8	4	3	4	2	4	4	3,5	4	3	4	4	4	4	3,833
32	3	1	2	1	1	2	2	3	3	3	2,6	3	3	3	4	2	2	2,833	3	3	3	2	2	3	2,667
33	4	1	2	1	3	2	2	2	2	3	2,2	2	2	3	4	2	2	2,5	2	2	3	2	2	2	2,167
34	2	1	1	3	2	4	2	2	4	4	3,2	2	4	4	2	4	2	3	2	4	4	4	2	2	3
35	1	1	1	1	2	2	3	4	4	4	3,4	4	4	4	4	2	3	3,5	4	4	4	2	3	4	3,5
36	3	2	2	3	2	4	4	5	5	5	4,6	5	5	5	3	4	4	4,333	5	5	5	4	4	5	4,667
37	3	2	2	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,833	4	4	4	4	4	4	4
38	4	1	2	1	1	5	5	5	5	4	4,8	5	5	4	4	5	5	4,667	5	5	4	5	5	5	4,833
39	3	1	2	1	3	4	3	4	5	4	4	4	5	4	5	4	3	4,167	4	5	4	4	3	4	4
40	4	1	2	1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
41	4	2	2	2	2	4	2	4	3	4	3,4	4	3	4	5	4	2	3,667	4	3	4	4	2	4	3,5
42	4	1	2	3	3	5	5	5	5	4	4,8	5	5	4	3	5	5	4,5	5	5	4	5	5	5	4,833
43	5	1	2	1	2	5	5	5	5	4	4,8	5	5	4	4	5	5	4,667	5	5	4	5	5	5	4,833
44	4	2	2	3	1	3	3	3	3	4	3,2	3	3	4	3	3	3	3,167	3	3	4	3	3	3	3,167
45	1	1	1	3	2	4	3	4	4	4	3,8	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3,833
46	4	1	2	1	1	4	4	4	5	4	4,2	4	5	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4,167
47	2	1	1	2	3	4	3	4	5	5	4,2	4	5	5	5	4	3	4,333	4	5	5	4	3	4	4,167
48	4	1	2	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,833	4	4	4	4	4	4	4

Lampiran 3 Persentase Identitas Responden

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 25 tahun	3	6,3	6,3	6,3
26-35 tahun	4	8,3	8,3	14,6
36-45 tahun	12	25,0	25,0	39,6
46-55 tahun	24	50,0	50,0	89,6
> 56 tahun	5	10,4	10,4	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pria	40	83,3	83,3	83,3
Wanita	8	16,7	16,7	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Status Perkawinan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Belum menikah	11	22,9	22,9	22,9
Menikah	37	77,1	77,1	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SLTA	28	58,3	58,3	58,3
Diploma	7	14,6	14,6	72,9
Sarjana	13	27,1	27,1	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Penghasilan Perbulan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <Rp. 2.000.000	16	33,3	33,3	33,3
Rp. 2.100.000-3.999.999	20	41,7	41,7	75,0
Rp. 4.000.000-4.999.999	11	22,9	22,9	97,9
Rp. 5.000.000-5.999.999	1	2,1	2,1	100,0
Total	48	100,0	100,0	

Lampiran 4 Frequencies Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

A1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	12,5	12,5	12,5
	KS	12	25,0	25,0	37,5
	S	22	45,8	45,8	83,3
	SS	8	16,7	16,7	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

A2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	12,5	12,5	12,5
	KS	16	33,3	33,3	45,8
	S	18	37,5	37,5	83,3
	SS	8	16,7	16,7	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	6,3	6,3	6,3
	KS	8	16,7	16,7	22,9
	S	23	47,9	47,9	70,8
	SS	14	29,2	29,2	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

A4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	10,4	10,4	10,4
	KS	7	14,6	14,6	25,0
	S	22	45,8	45,8	70,8
	SS	14	29,2	29,2	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

A5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,1	2,1	2,1
	KS	6	12,5	12,5	14,6
	S	31	64,6	64,6	79,2
	SS	10	20,8	20,8	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Lampiran 5 Frequencies Transparansi (X₁)

B1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	6,3	6,3	6,3
	KS	8	16,7	16,7	22,9
	S	23	47,9	47,9	70,8
	SS	14	29,2	29,2	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

B2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	10,4	10,4	10,4
	KS	7	14,6	14,6	25,0
	S	22	45,8	45,8	70,8
	SS	14	29,2	29,2	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

B3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,1	2,1	2,1
	KS	6	12,5	12,5	14,6
	S	31	64,6	64,6	79,2
	SS	10	20,8	20,8	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

B4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	10	20,8	20,8	20,8
	KS	10	20,8	20,8	41,7
	S	18	37,5	37,5	79,2
	SS	10	20,8	20,8	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

B5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	12,5	12,5	12,5
	KS	12	25,0	25,0	37,5
	S	22	45,8	45,8	83,3
	SS	8	16,7	16,7	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

B6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	12,5	12,5	12,5
	KS	16	33,3	33,3	45,8
	S	18	37,5	37,5	83,3
	SS	8	16,7	16,7	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Lampiran 6 Frequencies Akuntabilitas (X₂)

C1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	6,3	6,3	6,3
	KS	8	16,7	16,7	22,9
	S	23	47,9	47,9	70,8
	SS	14	29,2	29,2	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

C2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	10,4	10,4	10,4
	KS	7	14,6	14,6	25,0
	S	22	45,8	45,8	70,8
	SS	14	29,2	29,2	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

C3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,1	2,1	2,1
	KS	6	12,5	12,5	14,6
	S	31	64,6	64,6	79,2
	SS	10	20,8	20,8	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

C4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	12,5	12,5	12,5
	KS	12	25,0	25,0	37,5
	S	22	45,8	45,8	83,3
	SS	8	16,7	16,7	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

C5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	12,5	12,5	12,5
	KS	16	33,3	33,3	45,8
	S	18	37,5	37,5	83,3
	SS	8	16,7	16,7	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

C6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	6,3	6,3	6,3
	KS	8	16,7	16,7	22,9
	S	23	47,9	47,9	70,8
	SS	14	29,2	29,2	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Lampiran 7 Reliability & Validitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,906	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A1	3,67	,907	48
A2	3,58	,919	48
A3	4,00	,851	48
A4	3,94	,932	48
A5	4,04	,651	48

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	14,88	13,686	,839	,870
A2	14,90	14,776	,731	,893
A3	14,60	13,819	,746	,890
A4	14,73	12,755	,792	,881
A5	14,56	14,762	,733	,892

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
18,42	21,312	4,616	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	200,333	47	4,262	2,772	,029
Within People	4,433	4	1,108		
Between Items	75,167	188	,400		
Residual	79,600	192	,415		
Total	279,933	239	1,171		

Grand Mean = 3,85

Lampiran 8 Reliability & Validitas Transparansi (X₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,886	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	4,00	,851	48
B2	3,94	,932	48
B3	4,04	,651	48
B4	3,58	1,048	48
B5	3,67	,907	48
B6	3,58	,919	48

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	17,88	20,665	,679	,869
B2	18,00	18,511	,825	,844
B3	17,83	20,993	,760	,859
B4	18,42	21,312	,488	,906
B5	18,15	19,744	,857	,842
B6	18,17	21,759	,663	,872

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21,69	28,858	5,372	6

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	226,052	47	4,810	4,097	,001
Within People	11,240	5	2,248		
Between Items	128,927	235	,549		
Residual	140,167	240	,584		
Total	366,219	287	1,276		

Grand Mean = 3,80

Lampiran 9 Reliability & Validitas Akuntabilitas (X₂)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,927	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	4,00	,851	48
C2	3,94	,932	48
C3	4,04	,651	48
C4	3,67	,907	48
C5	3,58	,919	48
C6	4,00	,851	48

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	18,42	21,312	,844	,906
C2	18,54	21,020	,771	,918
C3	18,37	23,261	,743	,920
C4	18,69	22,219	,808	,911
C5	18,71	23,317	,736	,921
C6	18,42	21,312	,844	,906

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
22,23	31,329	5,597	6

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	245,413	47	5,222		
Within People					
Between Items	5,101	5	1,020	2,682	,022
Residual	89,399	235	,380		
Total	94,500	240	,394		
Total	339,913	287	1,184		

Grand Mean = 3,93

Lampiran 10 Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,997 ^a	,994	,994	,07441

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	39,818	2	19,909	3595,909	,000 ^b
	Residual	,249	45	,006		
	Total	40,067	47			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,015	,445		4,538	,000
	Transparansi (X1)	,282	,045	,273	6,229	,000
	Akuntabilitas (X2)	,724	,043	,731	16,681	,000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

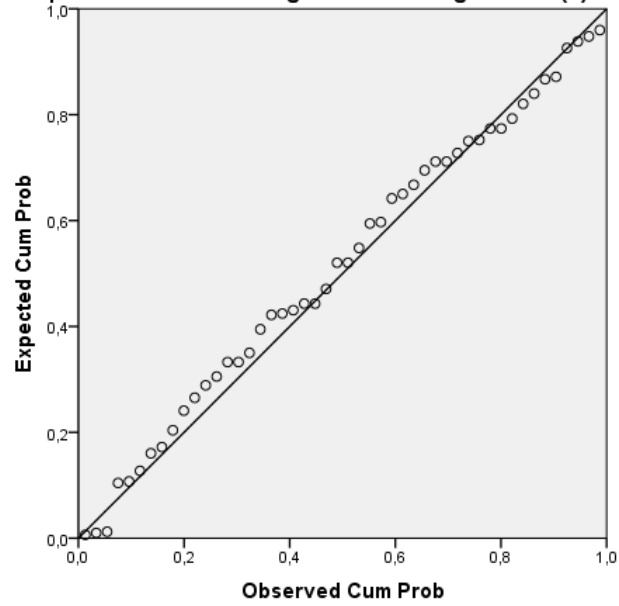
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Transparansi (X1)	,772	3,905
	Akuntabilitas (X2)	,772	3,905

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

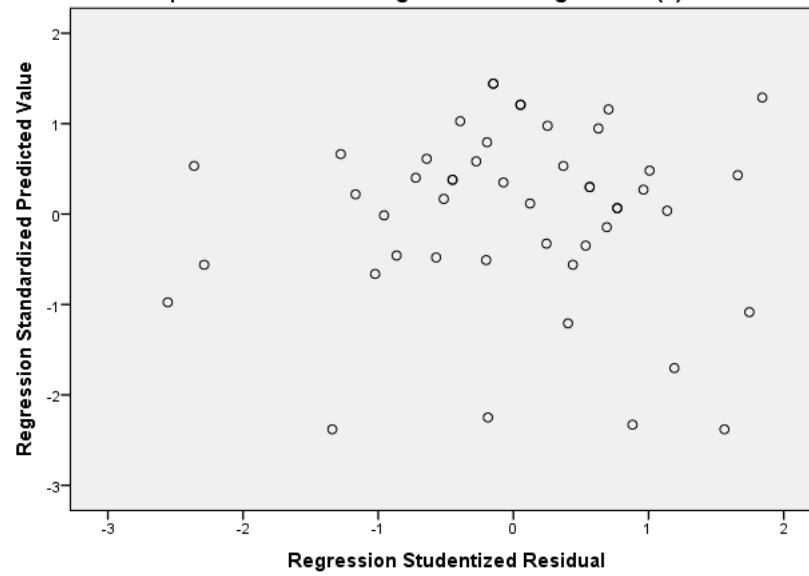
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa (Y)



Scatterplot

Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa (Y)



Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95%

n	Nilai r	n	Nilai r	n	Nilai r
3	0,997	27	0,381	55	0,266
4	0,950	28	0,374	60-64	0,254
5	0,878	29	0,367		0,244
6	0,811	30	0,361	73	0,235
7	0,754	31	0,355	75	0,227
8	0,707	32	0,349	80	0,220
9	0,666	33	0,344	85	0,213
10	0,632	34	0,339	90	0,207
11	0,602	35	0,334	96	0,202
12	0,576	36	0,329	100	0,194
13	0,553	37	0,325	125	0,176
14	0,532	38	0,320	150	0,159
15	0,514	39	0,316	175	0,148
16	0,497	40	0,312	200	0,138
17	0,482	41	0,308	300	0,113
18	0,468	42	0,304	400	0,098
19	0,456	43	0,301	500	0,088
20	0,444	44	0,297	600	0,080
21	0,433	45	0,294	700	0,074
22	0,423	46	0,291	800	0,070
23	0,413	47	0,288	900	0,065
24	0,404	48	0,284	1000	0,062
25	0,396	49	0,254		
26	0,388	50	0,279		

Note: n = Jumlah Sampel